

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilindungi oleh undang-undang atau seluruh karya tulis irfanyo mentuok sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

Dilarang memperjualbelikan dan memperbanyak atau sebagiatataa serunukaka ya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Bab III

REVITALISASI DAN STRATEGI DALAM PELESTARIAN BUDAYA MELAYU

Banyak alasan dan kebutuhan yang menyebabkan pemertahanan hadap budaya masyarakat Melayu menjadi keharusan bagi masyarakat Riau. Selain kebutuhan untuk mengukuhkan identitas, alam lingkungan masyarakat kontemporer dengan berbagai tuntutan nya, juga menantang masyarakat Riau untuk mengembalikan nilai-nilai lokal dalam fungsinya sebagai sumber kebijakan yang kontekstual dan jaminan masa depan yang kompetitif.

Upaya untuk mengembalikan, merevitalisasi dan mempertahankan nilai-budaya ini dilakukan dan disebarakan melalui komunikasi budaya yang secara menyeluruh meliputi semua elemen masyarakat dan dalam aspek kehidupannya. Setidaknya upaya-upaya itu dibedakan berdasarkan unsur-unsur budaya di mana upaya komunikasi itu berlangsung didasarkan pelaku komunikasi budaya itu sendiri. Menurut J.J. Koentjaraningrat (1986), budaya dibagi atas tiga unsur utama, yaitu gagasan (wujud ideal), aktivitas (tindakan) dan artefak (karya). Unsur besar ini kemudian dirinci lebih konkret lagi oleh Cateora menjadi kebudayaan material, kebudayaan nonmaterial, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika dan bahasa.

Sementara itu, pelaku budaya dalam tulisan ini difokuskan pada elemen pemerintah dan masyarakat, yakni bagaimana dan sejauh mana pelaku-pelaku

budaya itu menyadari unsur-unsur budaya mereka sendiri (Melayu) dan bagaimana mereka menghidupi dan mengkomunikasikan perspsi mereka kedalam aktivitas budaya tersebut dalam sebuah wadah besar masyarakat Melayu Riau.

Sejauh ini, beberapa aspek atau unsur budaya Melayu sudah dikomunikasikan dan dipraktikkan dengan baik oleh masyarakat Riau. Gagasan-gagasan kebudayaan secara luas diwacanakan oleh lembaga-lembaga budaya. Artefak budaya dibangun dan digalakkan dengan dukungan peraturan legal formal dari pemerintah. Secara kuantitas, *event* budaya dan kesenian kerap diadakan dan menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Permasalahan yang muncul kemudian dalam dinamika komunikasi budaya masyarakat Riau membuat upaya-upaya itu menjadi pasang surut. Problem itu muncul karena sebab-sebab fundamental seperti banyaknya subetnis (*puak*) Melayu di Riau yang memiliki gagasan serta persepsi masing-masing terhadap budaya Melayu. Belum lagi gempuran budaya yang bersumber dari modernitas serta yang menjadi ekse globalisasi terus menerus menggeser urgensi kebudayaan Melayu bagi masyarakat Riau. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah menemukan akar permasalahan tersebut, merinci dan memformulasikan berbagai kemungkinan solusi untuk mengatasinya.

Sebelum itu, perlu diuraikan satu per satu aktivitas komunikasi budaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau dan bagaimana mereka melakukan komunikasi budaya. Oleh karena antara satu jenis budaya dengan yang lainnya tidak mungkin dipisahkan, maka penelitian pada satu bagian merupakan bagian atau terkait dengan bahasan lainnya.

Identifikasi Masyarakat dalam Mengeksplor dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu Riau

Gagasan Kebudayaan

Definisi gagasan budaya mencakup di dalamnya nilai, norma, falsafah dan ajaran-ajaran yang melandasi seluruh aktivitas budaya dan mengawali penciptaan artefak-artefak kebudayaan (Koentjaraningrat, 1986). Yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Universitas Riau
 2013

sejara aktif terus menerus merevitalisasi gagasan tentang Melayu Riau adalah lembaga-lembaga budaya dan kesenian, lalu media massa baik surat kabar maupun televisi lokal Riau. Pemerintah pun melalui berbagai program kebudayaan berusaha terus menerus mewacanakan gagasan kemelayuan kepada masyarakat luas.

Banyak wacana tentang budaya Melayu. Yang paling kuat di antaranya adalah wacana tentang Melayu yang universal dan bisa menjadi satu gagasan budaya yang mendunia. Pemerintah Riau bekerja sama dengan berbagai institusi budaya dan masyarakat pernah mengadakan sebuah *event* bertaraf internasional yang bernama Seminar Budaya Melayu Sedunia, diselenggarakan pada tahun 2003 dan 2008 yang mengangkat isu Melayu universal ini.

Kesadaran untuk mengutamakan Melayu sebagai gagasan dan identitas yang perlu dikomunikasikan demi kelestariannya juga sudah direalisasikan dalam sebuah visi besar yang dilegalkan undang-undang, yakni Visi Riau 2000. Visi ini dicetuskan dan diuraikan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001. Dalam waktu kurang dari dua puluh tahun diharapkan seluruh elemen masyarakat Riau mampu mewujudkan gagasan Melayu yang bisa menyatukan banyak manusia di negara-negara yang berbeda dan bahkan menjadikan Riau sebagai pusat dan kiblat budaya Melayu tersebut.

Wacana tentang Melayu Riau yang juga terus menerus dikomunikasikan tentang kemurnian Melayu dan relevansinya dengan agama Islam. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menjadi salah satu pihak yang membawa semangat purifikasi budaya dan eksklusifisme Melayu dalam keislaman. Dapat dikatakan bahwa, salah satu agen yang terus meredefenisi Melayu Riau sebagai sesuatu yang identik dengan Islam LAMR ini. Semangat LAMR juga nampaknya tidak mengarah kepada kemajuan atau masa depan, jika kemajuan dan masa depan itu harus nilai-nilai budaya Melayu tradisional yang sudah dianggap mapan. LAMR menjadi lembaga yang dalam mewujudkan Visi Riau 2000 untuk mempertahankan seluruh nilai-nilai adat tradisional Melayu (berasaskan Islam) dengan “menghalau” nilai-nilai ‘budaya luar’ yang suai. Tidak ada kompromi, akulturasi, atau transformasi budaya dalam proses mewujudkan bentuk masyarakat yang relevan dengan gagasan kemelayuan itu.

Senada dengan LAMR, Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Riau (FKPMR) dalam kegiatannya membela masyarakat adat misalnya dalam memperoleh hak akan tanah *ulayat*-nya (tanah masyarakat asli) juga menghendaki pemurnian budaya Melayu dan sterilisasi dari unsur-unsur non-Melayu (Dokumen FKPMR, 2003). Pemertahanan terhadap *tanah ulayat* menjadi penting karena ancaman terhadap *tanah ulayat* berarti juga ancaman terhadap kebudayaan Melayu Riau yang hidup di dalamnya. Ketika tanah *ulayat* dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang luar, maka mereka juga akan membawa kebudayaan mereka sendiri. Tentu saja akulturasi tidak selalu buruk. Akan tetapi, dalam konteks ini pendudukan *tanah ulayat* dilakukan melalui konflik. Sedikit sekali kemungkinan terjadi akulturasi. Jika ada, itu hanya bersifat sementara atau semu yang berlandaskan tekanan satu pihak kepada pihak lain. Progresivitas gagasan Kemelayuan tampak mulai dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh *Tennas Effendy Foundation (TEF)* yang bergerak pada bidang pendidikan. Melayu harus menjadi landasan masyarakat yang cerdas dengan tingkat literasi yang tinggi.

1.2 Peran Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah

Selain terkait gagasan kemelayuan, tindak komunikasi juga tampak dalam aktivitas-aktivitas kebudayaan masyarakat Riau. Yang paling dominan tentu saja aktivitas kesenian dan *event* budaya yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Sementara itu, pemerintah telah mewujudkan komunikasi budaya melalui peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat dan berlandaskan hukum tentang aktivitas-aktivitas budaya masyarakatnya.

Pemerintah, sebagai bagian dan penyatu masyarakat merupakan pihak yang relevan untuk melakukan tindakan komunikasi budaya baik melalui peraturan-peraturannya yang mengikat, maupun tindakan-tindakan yang dilakukan di dalamnya yang mengimplementasikan komunikasi budaya tersebut. Beberapa waktu sebelum dilegalkannya Visi Riau 2020 dalam Undang-undang, berbagai upaya formal juga sudah ditempuh pemerintah dalam mengatur kehidupan berbudaya masyarakatnya. Salah satunya adalah berupa pemakaian adat Melayu. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2001 secara jelas menguraikan poin-poin tentang pelestarian nilai-nilai budaya Melayu melalui pemakaian busana Melayu. Seperti tercantum





1. Di dalam pelaksanaannya, Perda ini diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Swasta/BUMN, siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar hingga lanjut serta pegawai institusi yang lain agar sehari dalam seminggu yakni hari Jumat, menggunakan busana adat Melayu dalam aktivitas kerja dan belajar mengajar mereka. Dengan begitu, diharapkan mereka mampu mendorong terciptanya lingkungan kondusif untuk pelestarian budaya Melayu, dan khusus untuk pendidik, dapat memberi contoh kepada anak didik yang merupakan generasi penerus pelestari kebudayaan Melayu.

Peraturan ini menjadi tepat untuk dicetuskan sejak awal karena berkenaan dengan hal yang urgen dan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, busana akan mencerminkan hal-hal yang paling dalam, mewakili ciri khas seseorang dan sebuah masyarakatnya. Busana bisa menjadi identitas juga bisa mengomunikasikan banyak hal untuk dihayati. Di dalam busana juga terdapat berbagai simbol-simbol yang maknanya merangkum seluruh falsafah hidup masyarakat penggunanya. Melestarikan busana dengan demikian berarti menjaga falsafah dan secara tidak langsung akan mengahinkannya pula. Peraturan ini juga mengatur sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuinya. Bagi PNS yang tidak mematuhi peraturan itu, akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980. Sementara itu, sanksi untuk pegawai di BUMD ditetapkan dan dilakukan oleh institusi masing-masing. Peraturan daerah dari Pekanbaru ini bisa dijadikan sebagai pioner. Secara berturut-turut beberapa kabupaten di Riau akan menerapkan peraturan yang sama. Perkembangan ini akan membawa kemajuan yang menggembirakan dan perlu terus didorong agar mencapai nilai maksimal.

Selain peraturan-peraturan yang sudah dilegalkan dalam undang-undang, pemerintah juga mengeluarkan berbagai anjuran dalam setiap kesempatan. Salah satu anjuran masyarakat tentang penggunaan ikon-ikon budaya Melayu. Yang paling mendasar adalah anjuran untuk menggunakan *selembayung* sebagai hiasan dari setiap bangunan di wilayah Riau.

2.1.3 Aktivitas Lembaga Budaya

1. Selain pemerintah, beberapa lembaga atau komunitas yang menjadi bagian dari masyarakat juga berusaha *concern* dalam aktivitas-aktivitas

kebudayaan Melayu di Riau. Beberapa di antaranya adalah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Dewan Kesenian Riau (DKR) dan Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Riau (FKPMR). Selain organisasi dan komunitas di atas, timbul juga gerakan-gerakan baik yang terstruktur ataupun yang sporadis dengan tindakan-tindakan konkretnya mendukung aktivitas kebudayaan Melayu secara menyeluruh.

a. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan Penyebaran Wacana

LAMR didirikan pada 6 Juni 1976. Berdasarkan AD/ART pasal 3, LAMR berasaskan syariat Islam, berfalsafah Pancasila, bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Tujuan pendirian LAMR antara lain, (1) menggalakan membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Melayu Riau sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jatidiri masyarakat Melayu Riau; (2) mewujudkan masyarakat adat dan budaya Melayu Riau yang maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madai dalam NRI; (3) membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah Melayu Riau.

Bentuk LAMR adalah konfederasi yaitu keterpaduan federasi-federasi dan Kabupaten/Kota dan Kawasan adat otonomi di wilayah Propinsi Riau. LAMR berfungsi sebagai (1) perhimpunan anggota masyarakat adat yang mendukung utama adat dan budaya Melayu Riau; (2) mengemban, memelihara, dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat dan adat kebiasaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (3) memantau, mengamati, melaporkan, memadukan, menyalurkan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Melayu Riau; (4) bimbingan masuknya nilai-nilai buruk budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat dan agama; (5) sebagai mitra pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau (AD/ART LAMR Bab IV pasal 4).

LAMR berfungsi di atas kemudian diterjemahkan oleh LAMR dalam kegiatan yang fungsinya melegitimasi dan menyebarkan wacana-wacana yang sudah dibangun sejak awal, seperti Melayu adalah Islam dan perwujudan budaya Melayu. Aktivitas budaya LAMR lebih didominasi oleh





kegiatan-kegiatan akademis seperti seminar, diskusi dan penyebaran wacana melalui fatwa dan statemen-statementen di media massa oleh para pemangku adat.

b. Dewan Kesenian Riau (DKR) dan Seni Rakyat

Seperti dewan kesenian pada umumnya, Dewan Kesenian Riau juga menjaui lembaga yang legitimatif dalam mengiringi pertumbuhan dan perkembangan kesenian di Riau. Sebagai bagian dari budaya Melayu pada umumnya, aktivitas kesenian menjadi tulang punggung utama dan aktivitas yang paling kongkret. Hingga sampai saat ini, kesenian yang biasa dipertunjukkan oleh DKR adalah seni tari. Walau masih terbatas pada kesenian-kesenian tertentu, tetapi dalam level komunikasi, DKR dapat dianggap cukup berhasil. Pertunjukkan DKR sering mendapat perhatian masyarakat. Terdapat interaksi langsung antara mereka dengan pihak-pihak DKR dan pemerintah. Ketika kegiatan DKR dilaksanakan, masyarakat menjadi penonton dan langsung terlibat dalam proses negosiasi akan pemaknaan terhadap simbol-simbol budaya Melayu, yang dalam hal ini seni tari. Keberhasilan strategi ini dapat dilihat langsung melalui antusiasme masyarakat terhadap pertunjukkan tersebut.

c. Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Perjuangan Tanah Ulayat

Lembaga lain yang menyatakan diri peduli dan melakukan aktivitas kebudayaan di Riau adalah Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Riau FKPMR. Ketika reformasi melanda Indonesia tahun 1998, FKPMR memberikan beberapa pernyataan agar reformasi juga dilakukan oleh pemerintah Riau. Di lapangan kebudayaan, FKMPR selalu membela masyarakat adat misalnya dalam memperoleh hak akan tanah *ulayat*-nya (masyarakat asli) (Dokumen FKMPR, 2003).

Selama ini FKPMR banyak memperjuangkan pemertahanan tanah (tanah masyarakat asli) dari penguasaan oleh pemilik modal. Artinya, FKPMR lebih menitikberatkan kepada penyelamatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat Melayu Riau. Jika kondisi sosial ekonomi masyarakat cukup baik, maka kebudayaannya pun akan terpelihara. Jadi, apa yang dilakukan FKPMR langsung atau tidak merupakan aktivitas kebudayaan yang berujung kepada pemeliharaan kebudayaan, lebih jauh lagi demi revitalisasi identitas budaya Melayu.

d. **Event Budaya, Aktivitas Budaya Paling Konkret**

Ada beberapa even budaya sebagai identitas budaya Melayu di Riau yang terkenal dan lestari hingga kini, serta menjadi komoditas wisata yang menjanjikan seperti kegiatan Paju Jalur di Kuantan Singingi (Kuansing), Mandi Balnau, dan Festival Lampu Colok. Even-even ini merupakan bentuk aktivitas budaya yang paling konkret dan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat Riau karena masyarakat sendirilah yang menjalankannya.

a. **Paju Jalur**

Paju Jalur telah menjadi tradisi yang berakar dalam masyarakat Kuansing. Paju Jalur merupakan kegiatan adu kecepatan antara beberapa perahu (jalur) dengan muatan 40-60 di pendayung setiap perahunya.

Dasulu, di awal abad ke-17 jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga ke permukiman Cerenti di bagian hilir. Jalur benar-benar dianggap alat angkutan penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40 orang.

Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah seperti ukiran kepala uar, buaya, atau harimau. Perubahan tersebut sekaligus menandai perubahan fungsi jalur menjadi tidak sekedar alat angkut, namun juga menunjukkan identitas sosial. Sebab hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan aristokrat saja yang mengendarai jalur berhias itu. Baru 100 tahun belakangan ini warga melihat sisi lain yang membuat keberadaan jalur menjadi semakin menarik, yakni dengan digelarnya acara lomba adu kecepatan perahu yang kemudian dikenal sebagai pacu jalur. Pacu jalur awalnya diselenggarakan di sepanjang sungai Kuantan untuk memperingati hari besar seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, Tahun baru 1 Muharram, dan sebagainya. Tidak ada hadiah yang diperebutkan kecuali makan bersama warga yang diiringi dengan menu tradisional setempat seperti *konji*, *godok*, *lopek*, *panirang*, *lida kambing*, dan *buah golek* (Riau Pos, 27 Agustus 2006).

Kegiatan Paju Jalur ini tidak hanya diadakan sendiri saja. Banyak kegiatan seni tradisi lainnya yang digelar ketika Paju Jalur diadakan, seperti pertunjukkan cerita tradisional randai, seni musik rarak, serta pertunjukkan berkisah yang diikuti oleh peralatan talam, yakni kayat. Oleh



kaena kemeriahan dan keunikannya ini Pacu jalur mampu membuat Kuantan Singingi banyak dikenal di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi, Paju Jantar bukan lagi sekedar even lokal, tetapi telah menjadi even nasional bahkan internasional.

b. Mandi Balimau

Event lain yang tidak kalah meriah dan dikenal di Riau adalah even yang disebut Mandi Belimau. Di beberapa tempat *event* ini dikenal dengan nama lain seperti *Balimau Kasai*, *Petang Megang*, *Potang Balimau*, dan *Potang Megang*. Perbedaan nama ini berkaitan dengan proses legitimasi masing-masing daerah terhadap *event* tersebut.

Mandi Balimau atau *Petang Megang* merupakan tradisi masyarakat Riau menyambut bulan Ramadhan dengan mandi di tepian sungai Siak sebagai simbol menyucikan diri. Tradisi ini biasanya diikuti oleh serangkaian tradisi lain seperti mengunjungi makam pendiri kota, budayawan, agama, dan lain-lain.

Meskipun inti tradisi ini sama, yakni mensucikan diri, tetapi terdapat makna lebih mendalam lagi yang bervariasi di setiap puak-puak Melayu Riau. Di kabupaten Kampar, tradisi ini disebut sebagai *Balimau Kasai* (Riau Pos, 2 Agustus 2009). Menurut seorang ulama di sana, tradisi *Balimau* merupakan wujud asimilasi antara tradisi adat dan syariat Islam.

Secara historis tradisi mandi di sungai dalam *Balimau Kasai* adalah varian masyarakat yang memang di zaman itu belum mengenal MCK karena dibangun di dalam satu bangunan tempat tinggal. Selain itu, masyarakat Riau dahulu suka merantau atau mencari penghidupan ke luar dari kampung, baik ke negeri orang untuk berdagang maupun ke hutan untuk mencari kayu atau tumbuhan lain guna dipasarkan. Setiap ramadhan mereka beristirahat dan menjalankan puasa. “Biasanya mereka di hari *puasa kasai mereka berkumpul. Bermusyawarah memikirkan bagaimana membangun kampung. Saat itu juga dilaksanakan acara *puasa maaf-maafan satu sama lain*” (Riau Pos, Minggu 23 Agustus 2009). Selain silaturahmi ini juga ditandai dengan mengunjungi keluarga dan sanak saudara sambil membawa makanan dan limau, serta kasai, sebagai alat untuk menyucikan diri. Sebab, saat itu belum popular sabun dan sampo.*



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
 Cetak dan Dikawatirkan
 atau seluruhnya
 atau sebagian
 atau ditiru
 atau diperjualbelikan
 atau dengan cara lain
 tanpa izin tertulis
 dari penerbit
 atau dengan cara lain
 tanpa izin tertulis
 dari penerbit
 atau dengan cara lain
 tanpa izin tertulis
 dari penerbit

c. Festival Lampu Colok

Tradisi Lampu Colok adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kabupaten Bengkalis dalam rangka acara malam takbiran untuk menyambut hari kemenangan Idul Fitri (lebaran). Selain sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis, lampu colok ini diperlombakan antar kampung dan acara ini didukung oleh pemerintah Daerah Bengkalis yang dijanjikan sebagai salah satu Budaya yang harus dilestarikan.

Pemasangan lampu colok ini sudah menjadi tradisi setiap tahun diakhir bulan Ramadhan dalam menyambut malam takbir dan lebaran. Lampu colok ini terbuat dari kaleng bekas yang diberi sumbu dan diisi minyak tanah dan kemudiannya disusun berupa kubah - kubah masjid dan hiasan kaligrafi.

Tradisi Lampu Colok tradisi ini berawal dari keinginan masyarakat untuk memberikan penerangan di bulan Ramadhan, sekaligus tradisi ini merupakan syiar Islam sebagai hiasan - hiasan lampu yang ada selalu bernilai Islami. Keindahan lampu colok yang dihias dalam bentuk kubah masjid dan kaligrafi ini digemari oleh warga setempat dengan keluar rumah dan berkeliling kampung.

Kini tradisi itu sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah di Riau. Pekanbaru menjadi salah satu wilayah yang sangat antusias setiap kali diadakan tradisi ini. bahkan festival ini dengan berbagai rupa dimodifikasi dan dijadikan salah satu ikon pariwisata kota tersebut. Festival tidak hanya diadakan di dalam kota, tetapi menyebar di kecamatan-kecamatan seluruh Riau. Dengan kemajuan teknologi, penampilan lampu colok menjadi semakin menarik. Sudah sejak tahun 1995 pula, festival ini dilombakan sehingga masyarakat berusaha menampilkan lampu colok terbaiknya.

Salah *event* budaya seperti yang sudah dicontohkan uraian di atas ini menjadi wilayah yang paling bisa menarik perhatian masyarakat langsung. Even-even budaya inilah yang secara masif menarik masyarakat di dalamnya. Efek hiburan dan kesenangan di dalam event budaya juga menjadi salah satu nilai lebih mengapa pemerintah perlu menetapkan perhatian ekstra dalam aspek ini.

Artefak Budaya: Pariwisata dan Kuliner Melayu

Insur kebudayaan ketiga, selain gagasan dan aktivitas budaya adalah artefak, yang meliputi hasil dari gagasan dan aktivitas budaya yang bisa diindra





dalam menjadi monumen kebudayaan. Di Riau, artefak budaya meliputi bangunan-bangunan peninggalan sejarah, benda-benda budaya, kuliner Melayu dan sebagainya.

Dalam konteks kemelayuan, kuliner Melayu merupakan artefak budaya yang paling dominan dan yang mampu menjadi simbol budaya di era kontemporer ini. Begitu banyak ragam kuliner Melayu, mulai dari sayur, lauk, makanan ringan, kue-kue, dan minuman. Nama-namanya sangat khas Melayu seperti Gulai Ikan Salai, Gulai Asam Pedas Patin, Gulai Asam Pedas Bawang, Lempok Durian, Roti Jala, Sambal Tempoyak, Laksamana Menganuk, dan lain-lain. Makanan ini masih mudah dan banyak ditemukan walaupun kini, penjual makanan mulai beralih ke menu-menu masakan modern atau minang. Peneliti mengamati di kota Pekanbaru, hanya ada sedikit rumah makan atau restoran yang memajang dirinya sebagai pusat masakan Melayu, seperti Rumah Makan Sri Mersing yang dikelola pemerintah daerah. Dari segi pengunjung, tidak banyak orang tertarik ke rumah makan itu. Ada satu nama lagi, Rumah Makan Bujang Dara, tapi kini sudah tutup. Memang, tetap banyak rumah makan yang menyediakan masakan Melayu, tetapi mereka tidak mempromosikan masakan Melayu tersebut secara eksplisit, contohnya rumah makan Pondok Beringin Riau Kuring.

Walaupun demikian, di rumah-rumah penduduk, bisa dipastikan masakan Melayu masih dominan. Kebertahanan yang kuat dari kuliner Melayu ini tentunya terkait erat dengan faktor-faktor fisik geografis dan sumber alam yang tersedia. Sebagai contoh sederhana, masyarakat Melayu yang akuatik mempengaruhi pola makan yang terlihat dari lauknya yang banyak ikan. Sebab, ikanlah sumber daya alam yang paling melimpah sudah didapatkan di sungai-sungai.

Dengan asumsi ini pula kita melihat adanya ‘pergeseran selera’ masyarakat Melayu di Riau terutama yang tinggal di pusat-pusat kota dengan kelas mereka tinggi. Meski masih dekat dengan sungai, tetapi fungsi sungai sudah berubah. Kondisi geografis juga berubah. Belum lagi orang-orang di masyarakat tersebut mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga mempunyai lebih banyak alternatif baru tentang makanan. Perubahan-perubahan ini bukan tidak mungkin lambat laun bisa menggeser pula pola dan selera makan mereka.

Untuk mencegah hal itu, pemerintah sudah berusaha mengadakan even-even berkaitan dengan kuliner Melayu. Selain itu, modifikasi terus menerus dilakukan agar kuliner Melayu bisa diterima luas oleh berbagai masyarakat dari budaya yang berbeda. Barangkali, modifikasi kuliner Melayu menjadi strategi terbaik dalam upaya mendinamiskannya dengan perkembangan zaman. Dalam proses memodifikasi ini, masyarakat harus mulai memiliki semangat untuk tidak hanya melestarikan kuliner Melayu tetapi memelayukan berbagai kuliner yang secara cita rasa dan bahan-bahan berasal dari bumi Melayu. Maksudnya, masyarakat Melayu harus berkreasi atau menciptakan masakan yang memenuhi selera banyak orang, yang karena dihasilkan oleh masyarakat Melayu dengan bahan-bahan dari daerah yang dihuni orang Melayu, maka dapat disebut sebagai masakan Melayu. Jadi, untuk mendorong pemertahanan budaya Melayu, tidak hanya pelestarian yang dipelukan, tetapi juga modifikasi, dan bahkan penemuan-penemuan baru (*invention*) dalam bidang kuliner.

2. Kontestasi dan Strategi dalam Pelestarian Budaya Melayu Riau

Mengacu pada uraian sebelumnya, tersirat bahwa terdapat berbagai pendapat atau gagasan tentang Melayu dan masa depannya di Riau, aneka perwujudan aktivitas kebudayaan dan hasilnya yang membentuk artefak-artefak budaya Melayu menunjukkan adanya perbedaan dalam menghayati dan menjalani kehidupan kemelayuan. Perbedaan itu kemudian berdampak pula pada langkah dan strategi yang seringkali membuat satu kelompok kelompok pengusung budaya yang lainnya saling berkontestasi.

Dalam kontestasi itulah, esensi pertahanan dan penguatan budaya Melayu sebagai identitas seringkali menjadi kabur. Kepentingan dan *interest* pribadi cenderung mengemuka dan memperkeruh proses-proses komunikasi budaya. Sebelum merumuskan berbagai strategi yang dapat mengatasi friksi kontestasi yang *unproductive* tersebut, perlu ditelusuri strategi-strategi yang pernah digunakan, hasil-hasil positifnya dan kelemahan-kelemahan yang perlu ditangani.

Strategi-strategi yang hasil konkretnya sudah dirasakan oleh masyarakat akan strategi yang disusun dan direalisasikan oleh institusi-institusi budaya, yang merupakan lembaga utama penggiring wacana Melayu secara umum.



Pemerintah di satu sisi, dan masyarakat di sisi lain, dengan langkah-langkah spesifik dan bahkan individual juga menata strateginya masing-masing.

2.2.1 LAMR: Strategi Budaya Formal dan Solidaritas Etnis

Lembaga yang pertama dan utama menampakkan suatu strategi komunikasi yang jelas dalam memaknai dan mengomunikasikan simbol-simbol budaya Melayu Riau adalah LAMR. Secara keseluruhan, LAMR menjalankan strategi-strategi formal dalam melakukan komunikasi budaya, dimana mereka memosisikan diri sejajar dan dekat dengan pemerintah. Kemungkinan LAMR yang disamakan dengan pemerintahan Riau sehingga memiliki anak cabang hingga ke tingkat kecamatan memudahkan langkah-langkah interaksi dan komunikasinya.

Strategi lain yang dilakukan LAMR selain dengan merapat pada pemerintah, adalah menggunakan solidaritas etnis yang dianggap paling diminati, yakni Siak sebagai basis persatuannya. Sebagian besar orang-orang yang ada di LAMR terutama LAMR Kota Pekanbaru, yang pada kenyataannya memiliki kekuasaan paling besar dalam keorganisasian LAMR seluruhnya, adalah orang-orang Siak. Sementara lembaga yang lain, seperti FKPMR misalnya, banyak diisi oleh orang-orang dari Kuansing, Tebing Tinggi, dan Kampar.

LAMR memiliki kemampuan yang besar untuk menerbitkan buku-buku tentang budaya Melayu di Riau. Misalnya saja buku tentang busana Melayu, kuliner Melayu, arsitektur Melayu dan lain-lain. Sasaran utama dari buku-buku ini adalah masyarakat pendidikan seperti pelajar sampai mahasiswa, dosen, seni, dan pelaku adat yang berkaitan dengan upaya-upaya komunikasi budaya. Jalur pendidikan juga dipilih LAMR dalam usaha ini. Salah satunya dengan mengajukan usulan dan mengupayakan agar kurikulum di sekolah-sekolah memasukkan muatan lokal Melayu Riau sebagai salah satu mata pelajaran. LAMR juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memfasilitasi hasil budaya Melayu di Riau seperti tenun Siak.

Lain itu, LAMR memiliki sebuah *Balai Kerapatan* yang menjadi tempat untuk bermusyawarah mengenai persoalan-persoalan mutakhir di Riau, tidak hanya masalah budaya, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi.



Jadi LAMR juga mencoba untuk selalu menjadi perumus dan pemikir atas berbagai permasalahan yang terjadi di Riau melalui musyawarah di *Balai Kerapatan* ini. Khusus untuk ranah budaya, LAMR bisa menentukan berbagai sikap yang harus diambil oleh masyarakat umum. LAMR memposisikan diri sebagai penasihat atas jalannya kehidupan masyarakat Melayu Riau.

Strategi LAMR dari level yang paling abstrak (memberikan wacana-wacana budaya) hingga yang konkret (menerbitkan buku dan mengadakan pelatihan) dalam perjalanannya terhadang oleh problem-problem yang muncul dalam tubuh mereka sendiri. Problem ini menjadi penghalang proses interaksi yang sedang dibangun oleh LAMR dengan masyarakat Melayu. Problem yang utama adalah ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah sehingga LAMR tidak cukup memiliki independensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan kultural. Ranah budaya menjadi tumpang tindih dengan kepentingan politik. Seringkali, apa yang diperjuangkan LAMR berkaitan dengan kebudayaan dan adat Melayu tidak akan pernah jauh dari apa yang diinstruksikan pemerintah.

Problem lain muncul sebagai ekses dari solidaritas etnis yang menjadi bagian fundamental aktivitas budaya LAMR. Jika dipandang dari kepentingan *puak* tertentu, maka yang diperjuangkan LAMR adalah apa yang diperjuangkan *puak* Siak. Lebih jauh lagi, yang disebut sebagai Adat dan Budaya Melayu adalah adat dan budaya Melayu Siak. Hal ini dapat mengarah ke *puak* tertentu terhadap strategi komunikasi *puak*-*puak* lain yang mungkin berbeda.

Keterkaitan LAMR dengan pemerintah dan *puak* Siak kadangkala dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sama sekali tidak berkepentingan dengan budaya Melayu, *puak*, ataupun LAMR itu sendiri. Mereka semata-mata mementingkan keuntungan ekonomi dan politik. Jadi, dalam hal ini adat Melayu hanyalah menjadi kendaraan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan lain. Kenyataan-kenyataan inilah yang menjadi pembaharut strategi LAMR dalam mengkomunikasikan gagasan, aktivitas dan hasil budaya Melayu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merujuk ke Kelembagaan Universitas Riau.
 2. Dilarang menggunakan dan menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial apa pun.





10 Dilindungi hak cipta seluruhnya. Tidak diperdipakai untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik. Penjualan, distribusi, atau penggunaan lainnya tanpa izin dari Universitas Riau. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 1. Pengutipan tidak merujuk kepada Universitas Riau. 2. Dilindungi hak cipta seluruhnya. Tidak diperdipakai untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik. Penjualan, distribusi, atau penggunaan lainnya tanpa izin dari Universitas Riau. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

2.2.2 Yayasan Sagang dan Strategi Apresiasi

Lembaga lainnya yang lebih *concern* terhadap salah hasil budaya Melayu antara lain adalah halaman budaya *Sagang* terutama pada ranah kesenian dan kesusastraannya. *Sagang* merupakan nama halaman budaya di SKH Riau Pos. *Sagang*, seperti halnya Riau Pos sendiri, diharapkan mampu menjadi penjaga, pemelihara, penyangga, sekaligus sebagai agen perubahan. Lambat laun *Sagang* mendapat tempat yang baik di hati masyarakat sastra dan budaya pada khususnya dan masyarakat Riau pada umumnya. Halaman ini bahkan kemudian mampu melahirkan seniman-seniman muda Riau (*Sagang*, 2005: 7).

Se-demikian besar antusias masyarakat menyebabkan dewan redaksi mulai berpikir untuk menyediakan gelanggang yang lebih besar. Maka, pada bulan Oktober 1998 terbitlah edisi pertama Majalah Budaya Sagang. Sejak tahun 1996, *Sagang* juga menyelenggarakan Anugerah Sagang setiap tahunnya. Even ini diadakan untuk memberikan anugerah terhadap seniman/budayawan, buku, karya non-buku, institusi/lembaga seni budaya, seniman/budayawan serantau, karya jurnalistik budaya, dan karya penelitian budaya. Anugerah ini cukup memicu para budayawan dan sastrawan Riau untuk berkarya sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Beberapa seniman telah mendapatkan anugerah dari yayasan Sagang antara lain, Idrus (1996), Tenas Effendy (1997), Edi Ruslan P Amanriza (1998), Hasan (1999), Solaiman Syafi'ie (2000), Dantje S. Moeis (2001), Sudarno (2002), Taufik Ikram Jamil (2003), Al Azhar (2004), Yusmar (2005), Irawan Permadi (2006), UU Hamidy (2007), Fakhrunnas (2008), Zuarman Ahmad (2009), dan Eddy Ahmad RM (2010)

Saha-usaha Sagang ini, eksplisit atau tidak sebenarnya sudah memungkinkan sebuah komunikasi budaya di bidang kesenian yang efektif. Dengan demikian, dengan LAMR, *Sagang* lebih akomodatif terhadap kesenian. Hal ini terlihat dari acara-acara yang dilaksanakan, terutama dalam pemilihan *Sagang*, yang dalam memilih seniman, *Sagang* mempertimbangkan dan menghargai banyak faktor. Ada seniman-seniman yang mengacu ke dunia internasional, dan Barat, ada seniman yang mengabdikan diri pada nilai-nilai Melayu dan Islam, ada seniman yang memandang seni sebagai ekspresi Ketuhanan, dan lain-lain. Semua seniman-seniman itu dihargai dalam bidang dan konsistensi pemikirannya masing-masing.

Masyarakat yang terlibat dalam perhelatan Sagang juga cukup merata. Tidak hanya kaum seniman, tetapi juga pelajar dan masyarakat awam. Dalam kaitannya dengan aspek politik dan yang ada di luar budaya, strategi dan keberadaan Sagang bisa dibidang cukup steril dan netral. Totalitas strategi kebudayaan membuat kontestasi dan friksi bisa diminimalisasi dalam setiap aktivitas budaya yang mereka lakukan.

2.5 Tennas Effendy Foundation dan Strategi Akademis

Lembaga lain yang cukup berkompeten dalam rangka mengkomunikasikan dan melestarikan budaya Melayu di Riau adalah *Tennas Effendy Foundations*. Seperti namanya, lembaga ini didirikan oleh budayawan Melayu Tennas Effendi. Berkaitan dengan program pelestarian budaya Melayu TEF memposisikan diri dengan total untuk mendukungnya. Meskipun demikian, Tennas Effendy tidak serta merta menyetujui seluruh program pemerintah dan institusi-institusi budaya yang lain. Ia menganggap kebudayaan Melayu di Riau sangat beragam dan masing-masing kebudayaan yang memiliki *puak-puak* di Riau saling bersaing. Oleh karena adanya berbagai kepentingan yang mengekor pada kebudayaan ini, masing-masing *puak* akarnya sulit untuk disatukan.

TEF menginginkan adanya revitalisasi budaya sampai muncul ke permukaan di berbagai pihak ini untuk menghindari kontestasi dan mengupayakan negosiasi-konsolidasi. Namun begitu, TEF memandang bahwa melestarikan budaya Melayu bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan jalan yang dijanjikan untuk menyjahterakan masyarakat Riau khususnya dan membuat budaya Melayu mampu eksis di tengah riuhnya budaya global. Oleh karena itu, TEF yang dicita-citakan TEF disimbolkan dalam salah satu rencananya untuk membangun sebuah bangunan kompleks kebudayaan yang representatif sebagai pusat pertemuan (*convention*), penelitian, dan informasi, dan pendidikan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.

Dibandingkan dengan LAMR, kegiatan TEF lebih *segmented* lagi karena lebih titikberatkan di bidang penelitian-penelitian ilmiah. Hasil-hasil penelitian ini kemudian disampaikan kepada publik melalui seminar. Dalam beberapa hal TEF menyuarakan langkah-langkah yang sama seperti yang diupayakan LAMR yakni memasukkan kebudayaan ke dalam kurikulum





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau keperluan lain yang sah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan as Universitas Riau.
2. Dilarang memperjualbelikan dan menyalin kembali sebagian atau seluruh isi dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

atau ke dalam muatan lokal, penerbitan buku-buku kebudayaan, pelatihan. Tetapi, TEF juga mengkritisi langkah-langkah yang penyebarluasannya baru dalam tahap uji coba dan masih jauh dari mencukupi. Menurut Tennes, *kegiatan budaya kebanyakan masih bersifat seremonial. Kalaupun ada, bukanlah terbatas kepada beberapa orang atau sanggar yang mempunyai kepentingan tertentu dengan pihak luar yang mau menjadi 'bapak angkat' atau donatur sementara sosialisasi unsur-unsur kebudayaan Melayunya kurang diperhatikan (Riau Pos, 6 September 2007).*

Secara umum, usaha yang dilakukan TEF lebih terkonsentrasi pada sektor pendidikan di tingkat universitas (penelitian-penelitian ilmiah) dan promosi kebudayaan ke luar. Berkaitan dengan promosi kebudayaan Melayu ke luar negeri, secara gamblang TEF menyebutkan bahwa program pengembangan kebudayaan Melayu haruslah memiliki *commercial value* sehingga dapat menarik orang-orang di mancanegara.

2.7.4 P2K2 Unri: Strategi Akademik Kemasyarakatan

Institusi pendidikan seperti Universitas Riau (Unri) juga memiliki lembaga yang berkepentingan besar terhadap aktivitas komunikasi budaya Melayu, yaitu Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan (P2K2). Lembaga ini berusaha terus menelusuri jejak-jejak budaya Melayu, mendokumentasikannya, dan kemudian meneliti aspek-aspeknya. Tentu saja membicarakan kebudayaan Melayu dalam koridor keilmiah. Hasil penelitian mereka juga diabadikan dalam bentuk buku, ensiklopedi, dan laporan-laporan ilmiah.

Salahnya, pada bulan Januari 2008, Tim P2K2 melakukan ekspedisi menyusuri empat sungai yang ada di Riau, yaitu sungai Rokan, Indragiri, Siak, dan Siak. Ekspedisi susur sungai ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data tentang kondisi dan budaya masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai. Menurut mereka, kebudayaan Riau tidak pernah terlepas dari keberadaan sungai. Data-data yang mereka peroleh nantinya dikumpulkan dalam bentuk ensiklopedi budaya Melayu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 Riau Pos dan Riau TV: Strategi Budaya Berbasis Massa

a. Strategi Komunikasi Budaya Riau Pos

Riau Pos adalah surat kabar yang terbit pertama kali pada 17 Januari 1999. Beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya *Riau Pos* antara lain, untuk membongkar mitos bahwa sebuah surat kabar daerah tidak mungkin bisa eksis dan berkembang (Pengurus PWI Riau, Moeslim Roesli) dan untuk menciptakan media yang representatif bagi masyarakat Riau. Alasan yang terahir ini pula yang menjadi semangat diterbitkannya koran mingguan Warta Karya pada tahun 1987 yang menjadi cikal bakal *Riau Pos*. Jadi, kesadaran akan pentingnya peranan media dalam masyarakat sudah muncul sejak tiga dekade yang lalu. Hanya saja, kesadaran untuk mengakomodasi kebudayaan Melayu melalui media pada waktu itu belum tergambar.

Semangat melestarikan kebudayaan Melayu baru muncul ketika *Riau Pos* mengadakan ulang tahun yang ke-5. Orang-orang *Riau Pos* menyebut tahun ke-5 mereka sebagai tahun menembus mitos, karena berhasil menyalahkan mitos kerapuhan koran daerah. Saat itu, *Riau Pos* mengiklankan diri melalui simbol tokoh Melayu Wak Atan sedang berdiri riang, sambil memantapkan sebuah papan targetnya (papan sasaran), dengan anak panah menembak koran yang dilipat bak sebuah pesawat mainan. Menurut pihak *Riau Pos*, gambar itu menyimbolkan keberhasilan mereka menembus mitos, dengan gaya dan tradisi Riau, dengan citra dan filosofi budaya Melayu.

Salah satu aspek-kemelayuan yang disinggung *Riau Pos* kala itu baru pada tingkat simbol-simbol dan atribut saja. Pada tahun-tahun berikutnya, *Riau Pos* terlena dalam sebutan sebagai salah satu kekuatan komunikasi dan pembangunan Riau. Alih-alih mengakomodasi kemelayuan, pada periode awal terbitannya, Riau Pos lebih merepresentasikan diri sebagai kekuatan kapital baru di Riau.

Salah satu aspek-kemelayuan yang disinggung *Riau Pos* kala itu baru pada tingkat simbol-simbol dan atribut saja. Pada tahun-tahun berikutnya, *Riau Pos* terlena dalam sebutan sebagai salah satu kekuatan komunikasi dan pembangunan Riau. Alih-alih mengakomodasi kemelayuan, pada periode awal terbitannya, Riau Pos lebih merepresentasikan diri sebagai kekuatan kapital baru di Riau.

Salah satu aspek-kemelayuan yang disinggung *Riau Pos* kala itu baru pada tingkat simbol-simbol dan atribut saja. Pada tahun-tahun berikutnya, *Riau Pos* terlena dalam sebutan sebagai salah satu kekuatan komunikasi dan pembangunan Riau. Alih-alih mengakomodasi kemelayuan, pada periode awal terbitannya, Riau Pos lebih merepresentasikan diri sebagai kekuatan kapital baru di Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Diiringi dengan semangat dan usaha yang eksplisit mengacu komunikasi dan aktivitas kebudayaan Melayu di Riau, yakni TV Melayu. Menurut pihak direksi media siaran TV Melayu akan menambah semaraknya Riau sebagai negeri kepulauan. Selanjutnya, pihak TV Melayu juga meyakinkan masyarakat bahwa acara yang akan ditampilkan sebagian besar dikemas dengan nuansa Melayu. “Lewat TV ini, kita memang ingin melestarikan nilai-nilai budaya dan membangkitkan spirit kemelayuan”, ujar Susi Dewi Yanti sebagai Direktur Utama.

b. Strategi Komunikasi Budaya Riau TV

Media massa selain Riau Pos yang mengandalkan perspektif kelokalan adalah Riau TV. Salah satu perusahaan media yang masih merupakan anak Riau Pos Grup ini berdiri pada tanggal 20 Mei 2001 dengan nama PT Riau Media Televisi. Sejak awal pendiriannya, Riau TV memiliki beberapa visi dan misi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kehidupan berketuhanan yang memiliki semangat kuat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara belanaskan Pancasila demi masyarakat Indonesia umumnya dan Riau khususnya. Kedua, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional serta menumbuhkan kembangkan informasi dan budaya yang menjadi filter kehidupan. Ketiga, dengan semakin cepatnya perkembangan dunia informasi, khususnya media elektronik menjadikan media televisi khususnya lokal menjadi sarana tumbuh dan kembangnya budaya lokal sehingga lebih memupuk rasa kecintaan pada budaya daerah dan tanah air. Keempat, diharapkan Riau Televisi dapat menjadi media informasi terdepan bagi warga Pekanbaru dan Riau, sekaligus menjadi inspirasi dan aktualisasi pengembangan potensi & budaya masyarakat.

Pada poin visi misi ketiga disebutkan salah satu fungsi Riau TV adalah untuk mengembangkan budaya lokal, yang berarti budaya Melayu. Jadi secara implisit sudah ada semangat untuk melestarikan kemelayuan. Akan tetapi dilihat dalam konten acara secara keseluruhan, semangat itu bertulis di visi-misi saja. Upaya kongkret yang diwujudkan dalam acara-acara yang dipersembhkannya sangatlah minim—jika tidak dikatakan sama sekali tidak berarti.

Strategi Komunikasi TV Melayu

Riau-baru ini, tepatnya pada tahun 2009, sebuah media lokal didirikan dengan semangat dan usaha yang eksplisit mengacu komunikasi dan aktivitas kebudayaan Melayu di Riau, yakni TV Melayu. Menurut pihak direksi media siaran TV Melayu akan menambah semaraknya Riau sebagai negeri kepulauan. Selanjutnya, pihak TV Melayu juga meyakinkan masyarakat bahwa acara yang akan ditampilkan sebagian besar dikemas dengan nuansa Melayu. “Lewat TV ini, kita memang ingin melestarikan nilai-nilai budaya dan membangkitkan spirit kemelayuan”, ujar Susi Dewi Yanti sebagai Direktur Utama.

Selain itu, TV Melayu ini juga menjanjikan sesuatu yang tidak seluruhnya konvensional, tetapi selaras dengan dinamika pembangunan dan masyarakat di Bumi Melayu yang berkembang dinamis dan heterogen. Berdasarkan cita-cita dan misinya, TV Melayu ini agaknya dapat dianggap media yang secara formal representatif dengan usaha komunikasi budaya Melayu di Riau. Hanya saja usianya yang relatif muda dan keterbatasan jangkauan siaran membuat TV Melayu butuh waktu lebih lama lagi untuk betul-betul membuktikan dan menepati misi kemelayuannya itu. Namun demikian, idealisme dan semangat TV Melayu ini dapat menjadi contoh yang baik ketika hendak memposisikan media menjadi satu institusi yang berperan dominan dalam komunikasi dan menjadi bagian langsung dari aktivitas budaya Melayu.

2.2. *Selembayung*: Antara Kontestasi dan Integrasi

Konsekuensi dari tingginya animo masyarakat untuk mencari, menemukan dan mendiskusikan makna yang terkandung dalam nilai-nilai budaya Melayu Riau tersebut, memunculkan beragam perbedaan hingga “pertarungan” dalam menegaskan identitas budaya Melayu Riau, terutama dalam menentukan model bangunan atau arsitek bangunan perkantoran/perumahan yang saat ini dikenal dengan model *selembayung*. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya bagi masyarakat Riau untuk melegitaskan/mengeluarkan peraturan daerah tentang penggunaan model *selembayung* ini sebagai model bangunan perumahan/perkantoran masyarakat Melayu Riau.

Beragamnya perbedaan yang muncul dalam menentukan model bangunan yang ideal sesuai dengan referensi masing-masing masyarakat Riau dari beragamnya subetnis/*puak* Melayu Riau ini. Hal ini tak mengherankan mengingat Provinsi Riau secara geografis terletak berbatasan dengan Malaysia, Jambi, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Diversifikasi budaya inilah akhirnya masyarakat Riau kini memiliki minimal dua model bangunan, yakni model *lipat kajang* dari Melayu pesisir bersebelahan dengan Malaysia, model *limas* dari Indragiri Hulu, dan model *liong* dari Kampar yang bersebelahan dengan Sumatera Barat dan model *gubung* dari Bengkalis.

Di antara beragam model bangunan yang dimiliki oleh masyarakat Riau, perlu satu upaya agar bisa mengakomodasi yang beragam itu menjadi satu





model bangunan. Pemerintah melalui peraturannya kemudian menyepakati *selembayung* sebagai arsitektur resmi masyarakat Melayu Riau, mengingat *selembayung* merupakan perpaduan antara *lipat kajang*, *limas* dan *liontiok*. Sampai saat ini penggunaan *selembayung* terus menerus disosialisasikan oleh Pemprov Riau, walau belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat Riau.

Ketidakmaksimalan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara internal dari entitas *selembayung* itu sendiri, maupun dari pihak-pihak yang menggunakan *selembayung*. Ada berbagai aspek, terutama budaya yang mendukung keberadaan *selembayung* yang perlu ditelusuri lagi agar relevansi dan urgensi penggunaannya menjadi semakin kuat.

Sebelum menganalisis, faktor apa yang perlu didukung dari *selembayung* dan aspek-aspek apa yang perlu diperkuat atau bahkan dioreksi, perlu diuraikan secara singkat sejarah *selembayung* menjadi ikon bangunan masyarakat Melayu.

3.2 Selembayung Selayang Pandang

Selembayung disebut juga *Sulo Bayung* atau *Tanduk Buang*, yaitu bangunan yang terletak bersilangan di kedua ujung perabung bangunan *Belah Lintang* dan *Rumah Lontik*. Di bagian bawahnya kadang-kadang juga diberi hiasan tambahan seperti tombak terhunus yang bersambung dengan ujung perabung (Effendi, 2007: 621). Setiap bangunan yang menggunakan *selembayung* haruslah memakai sayap layangan sebagai padanannya. *Selembayung* ini terdapat pada keempat cucuran atap. Bentuknya hampir sama dengan sayap layangan pada keempat sudut cucuran atap merupakan lambang “empat kaki”, sementara sayap layang-layang melambangkan kebebasan yang luas dan tahu diri.

Selembayung yang diletakkan di bagian paling tinggi suatu bangunan mengandung lambang yang sangat tinggi artinya. Itulah sebabnya *selembayung* juga *Tajuk Rumah* atau mahkota suatu bangunan yang dipercaya membangkitkan seri atau cahaya bangunan itu. Ukiran *Selembayung* mengandung makna pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rumah yang menggunakan *Selembayung* ini dipercaya dapat menjadikan pemiliknya terhormat dan terkemuka di masyarakat. Jadi, *selembayung* dianggap ukiran yang paling dasar, utama, dan sempurna menjadi simbol Seni Bina Melayu

Riau secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebelum dikukuhkan melalui peraturan daerah, dalam rangka pelestarian budaya dan identitas Melayu Riau selembayung ditetapkan (oleh LAMR) sebagai ciri khas bangunan Melayu Riau yang resmi.

Selain makna-makna universal dari selembayung di atas, masing-masing komponen selembayung dan bagaimana selembayung diletakkan juga merepresentasikan pemaknaan yang berbeda-beda. Selembayung dalam keseluruhannya, dalam variasi letak dan coraknya memiliki sejuta makna dan falsafah hidup tertentu yang berkembang terus. Perkembangan itu merupakan upaya dan fakta yang menunjukkan perkembangan bentuk-bentuk budaya yang memperkaya dan memperkokoh identitas. Sejarah, eksistensi dan perkembangan positif itulah yang menyebabkan selembayung dipilih sebagai ikon arsitektur utama masyarakat Melayu di Riau. Selain itu, *selembayung* relatif lebih dikenal hampir oleh seluruh masyarakat Melayu Riau. Hal ini disebabkan *selembayung* bukan ciri dari suatu *puak* tertentu. *Selembayung* lebih umum dan tingkat keberterimaannya tinggi sehingga dapat terbebas dari konflik. Unsur *selembayung* juga hampir ada di seluruh ragam rumah adat yang ada di Riau. Selain itu, *selembayung* juga bangunan yang paling mungkin bisa mengikuti perkembangan zaman dikarenakan desainnya yang relatif mudah disesuaikan.

Di Riau, meskipun terdapat banyak variasi seni bina yang menunjukkan identitas lokal, tetap terdapat benang merah yang menunjukkan asal dan bentuk seni bina cikal bakal mereka yaitu *selembayung* (Tintin et. al, 1986). Hal ini terjadi sebagai tanggapan dan refleksi nilai budaya masyarakat Riau.

***Selembayung* sebagai Arsitektur dan Identitas**

Selembayung sebagai identitas bisa dirunut pertama kali pada relasi antara *selembayung* sebagai bangunan dan Melayu sebagai kelompok masyarakat. Hubungan antara keduanya adalah dinamis dan reflektif (Purwati, 1994:6). Pertama-tama, bangunan dibuat dan dibentuk oleh masyarakat, lalu bangunan itu yang kemudian membentuk masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan teori Giddens (1984) tentang strukturasi di mana struktur sosial memiliki relasi dialektik dengan tindakan-tindakan manusia. Struktur menjadi media sekaligus hasil dari praktik-praktik sosial. Dalam



hubungan demikian pula, selembayung menjadi identitas yang menghidupi sekaligus dihidupi oleh masyarakat Melayu di Riau.

Dalam hubungannya dengan arsitektur, identitas bisa terlihat dalam desain yang menjadi penanda atau karakter khususnya. Menurut Zarzar (1990) *we may refer to the identity of the architect when we recognize his/her design as a kind of brand*. Identitas harus selalu ada, namun ciri yang menandai identitas itu bisa berubah. *So, for us, if a city loses its current identity, it is simultaneously creating a new one. Change in the direct environment over time is thus part of the creation of a new identity* (Zarzar, 1990:63).

Berdasarkan pemahaman itulah selembayung dipilih sebagai arsitektur ikon identitas masyarakat Melayu di Riau. Selembayung sendiri hanyalah satu ornamen di antara berbagai bagian bangunan Melayu keseluruhan dan ornamen-ornamen lain seperti tangga dewa dan sayap layang-layang. Akan tetapi, seperti halnya pakaian, pemerintah berusaha mengambil satu ciri yang lebih universal dan diterima masyarakat kapanpun dan dari puak manapun. Selembayung, dibanding ornamen lainnya memungkinkan untuk diterapkan di berbagai jenis bangunan. Kemudahan dan fleksibilitasnya ini memungkinkan tercapainya keinginan pemerintah untuk memelayukan seluruh bangunan terutama yang menjadi fasilitas publik yang ada di Riau. Demikian, walau zaman berubah, kebutuhan dan urgensi dalam pembangunan bertambah, selembayung tetap bisa bertahan.

Menanggapi kedinamisan selembayung, respons dari instansi pemerintah dan swasta cukup baik, terutama di daerah Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan kenyataan banyak bangunan publik yang sudah menggunakan selembayung sebagai ornamennya. Akan tetapi, kecenderungan ini belum merata di seluruh kabupaten yang ada di Riau. Misalnya saja kabupaten Indragiri yang masih merasa bahwa rumah Lontiok adalah simbol bangunan atau kabupaten Bengkalis yang bentuk rumah kubahnya masih sangat tradisional. Di daerah-daerah tersebut, hanya gedung-gedung pemerintahan yang menggunakan selembayung.

Beberapa institusi budaya seperti DKR misalnya, juga masih menganggap *selembayung* tidak cukup mempunyai nilai-nilai filosofis. Nilai-nilai itu ada, hanya saja tidak tersosialisasikan dengan baik. Sampai saat ini



belum ada dokumen resmi, hasil-hasil penelitian ilmiah, ataupun informasi tertulis yang berisi kajian filosofi tentang *selembayung*, tentang keputusan memilih *selembayung*, dan potensi *selembayung* di masa depan. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah harus menyelesaikan masalah-masalah dasarnya yang terkait keberadaan *selembayung* yang kemudian memunculkan berbagai persepsi yang berbeda antar masyarakat puak atau istansi yang berkepentingan.

Sumber permasalahan perbedaan persepsi ini sebenarnya terletak pada masalah historis dan eksistensial. Masing-masing rumah di daerah itu memiliki ikatan historis tertentu di mana keberadaan dan kelestarian rumah itu sama halnya dengan eksistensi penghuninya. Rumah Lontiok di Kampar dan Kubah di Bengkalis telah menyatu dengan lingkungan geografis dan mental penduduknya. Rumah-rumah itu menjadi konkretisasi ruang eksistensi masyarakatnya (Norberg-Schulz 1971: 12) sehingga tidak mungkin dengan mudah diubah.

Sebuah ruang atau bangunan hanya menjadi tempat semata-mata, tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Namun bangunan dalam satu lingkungan tertentu dengan nama dan fungsi-fungsi kultural tertentu adalah berbeda. Bangunan itu tidak hanya sebuah ruang dan tempat tertentu, melainkan menjadi pancaran dan resonansi sejarah serta nilai-nilai masyarakat peribudayanya. Meskipun kehidupan masyarakat berubah, bangunan tersebut akan menjaga stabilitas dan mempertahankan nilai historis masyarakatnya (Norberg-Schulz 1984:5).

Oleh karena itu, perlu ada upaya menyeluruh yang bisa mengatasi berbagai problem yang tidak hanya harus diselesaikan, tetapi keniscayaan untuk diubah seringkali tidak mungkin diubah sehingga yang bisa dilakukan adalah bernegosiasi dengan makna yang filosofis. Upaya itu meliputi yang teknis praktis dalam kehidupan masyarakat.

Upaya yang pertama adalah menata ulang keberagaman *selembayung* dengan makna-maknanya untuk kemudian menempatkan masing-masing dalam fungsinya yang berbeda. Misalnya, pemerintah perlu menentukan ukuran baku perbandingan *selembayung* dalam perbandingan dengan bangunan utamanya. Hal ini diperlukan mengingat seringkali terjadi ketimpangan antara bangunan yang megah dan *selembayung*nya yang kecil saja. Kesan yang ditimbulkan





menjadi formalitas belaka. Secara estetis pun akan menjadi tidak indah saat ukuran selembayung dan bangunannya tidak proporsional.

Penggunaan warna dan corak flora fauna yang begitu banyak itu juga belum ditentukan peraturan bakunya. Perbedaan penggunaan warna dan corak itu bisa ditetapkan berdasarkan jenis bangunan utamanya. Misalnya, corak selembayung pada bangunan publik milik pemerintah dengan yang milik swasta perlu dibedakan. Juga corak atau warna untuk bangunan yang kegunaannya berbeda sebaiknya juga disesuaikan dengan makna yang sudah ada dalam corak atau warna tersebut. Upaya ini mendesak untuk dilakukan karena sampai kini penggunaan corak selembayung di Riau masih sekenanya. Penggunaan corak tombak terhunus misalnya, sebagian ada yang melengkung ke bawah, sebagian lagi melengkung ke atas.

Dengan peraturan yang rinci tersebut, perbedaan dan keragaman corak selembayung di Riau tidak lagi menjadi soal. Bahkan pemerintah bisa pula mengomodasi jenis rumah selain selembayung sebagai salah satu simbol bangunan resmi Melayu asalkan peraturannya jelas dan tetap terhubung dengan ikon utama selembayung. Yang terpenting, pemerintah bersama masyarakat harus menempatkan keberagaman yang adalah kekayaan dalam satu wadah besar Melayu.

Selain mengatur secara rinci penggunaan selembayung berdasarkan warna dan bentuknya, melakukan negosiasi dan kesepakatan di antara aparat yang terdiri dari *puak-puak* berbeda, pemerintah beserta seluruh masyarakatnya perlu memperjuangkan selembayung ketika menghadapi tantangan zaman. Revolusi di bidang industri, peningkatan teknologi komunikasi dan informasi, tuntutan global sangat berpengaruh terhadap pola pembangunan mencakup infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Salah satu tantangan dari infrastruktur tersebut adalah bangunan-bangunan, baik milik swasta, maupun milik perseorangan. Bangunan-bangunan ini akan diperbarui seiring dengan fungsinya yang terus berubah dalam rangka menyesuaikan dengan zaman. Demikian pula dengan infrastruktur di sekitar Pekanbaru Riau.

Pemilihan selembayung adalah suatu bentuk strategi pemertahanan budaya Melayu tanpa harus mengurangi keefisienan fungsi mutakhir bangunan-bangunan. Dengan adanya selembayung di atas bangunan semodern apapun,

maka bangunan itu dapat disebut bercorak Melayu. Suatu bangunan tidak harus terikat aturan-aturan tertentu yang mungkin mengurangi keefektifan fungsinya. Hal ini yang dipertimbangkan oleh beberapa pihak ketika membangun fasilitas publik modern di Riau. Jadi strategi ini dapat disebut sebagai strategi pertahanan minimal. Strategi yang berlaku ketika satu unsur budaya yang dianggap signifikan dan mempunyai makna yang lengkap dijadikan ikon yang disertakan kepada unsur budaya lain yang lebih modern.

Tetap dipertahankannya selembayung ini dikarenakan berbagai pertimbangan eksistensi, kepraktisan, dan nilai-nilai filosofis yang ada di dalamnya berkaitan dengan arus perubahan zaman yang begitu cepat. Di atas sudah dijelaskan bagaimana mekanisme negosiasi mengenai pemilihan selembayung berkenaan dengan keberadaan rumah adat atau ciri arsitektur lain yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu di Riau. Hasilnya, selembayung dipilih karena keberadaannya dapat dikatakan menyeluruh di Riau. Keragaman selembayung juga relevan dengan keragaman masyarakat di Riau. Pemilihannya dapat meminimalisasi kontestasi dan konflik antar suku-budaya Melayu yang ada di Riau. Walau tidak menutup mata bahwa terdapat resistensi dan penolakan terhadap *selembayung*, namun jumlah yang menolak tidak seberapa dibandingkan yang menerima dengan positif. Sering perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus kemungkinan terjadi konflik dapat ditekan sekecil-kecilnya dan keberagaman selembayung menjadi semakin luas.

***selembayung* dan Modernitas di Riau**

Keberadaannya, hampir 90% rumah orang Melayu di seluruh Riau masih menggunakan bangunan modern. Realitas ini menunjukkan bahwa dalam upaya mempromosikan budaya pada aspek arsitektural, peran serta masyarakat masih minim. Himbauan dan kemampuan pemerintah untuk menggiring masyarakat ini seringkali hanya sampai pada level instansi-instansi dan pegawai-pegawai pemerintah (tampak pada UU yang mengatur pakaian dan bangunan lain). Untuk itu, pemerintah harus mulai mengatur strategi yang secara bertahap dikenakan kepada masyarakat agar mereka dapat ikut berpartisipasi aktif dan sama dalam mengembangkan simbol bangunan Melayu ini.

Salah satu permasalahan kuantitas minimnya bangunan Melayu di tengah-tengah masyarakat awam, pemerintahan juga menghadapi masalah berkaitan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari buku ini tanpa izin dari penerbit.
 2. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, dan untuk tujuan lain yang bersifat akademis, diperbolehkan.
 3. Pengutipan tidak mengikat penerbit.
 4. Pengutipan tidak mengikat penerbit.



dengan makna-makna di balik bangunan Melayu. Secara kasat mata, simbol bangunan Melayu berupa selembayung mungkin terpampang di mana-mana, tetapi apakah makna dibalik ornamen seperti diuraikan di awal subbab masih ada dan diresapi oleh masyarakat yang menghuni atau yang ada di sekitarnya? Uraian untuk mensinkronkan antara makna dengan corak dan bentuk selembayung yang akan digunakan pada bangunan tertentu sudah diuraikan di muka. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melegalkan dan mensosialisasikan upaya itu seluas mungkin agar diketahui masyarakat.

Hingga kini peneliti menangkap gejala bahwa simbol selembayung, seperti kenyataannya, hanya merupakan tempelan. Meskipun *mall-mall* dan bangunan modern menggunakan selembayung, tetapi orang-orang di dalamnya bukan merupakan bagian dari simbol itu. Mereka melakukan aktivitas di dalamnya sebagai instrumen-instrumen kapitalis, manusia modern yang menjadi bagian dari globalitas. Oleh karena itu, pemerintah harus pula mempersiapkan program pendampingan dan publikasi besar-besaran dalam rangka mengembalikan fungsi-fungsi eksistensial ikon budaya seperti selembayung dalam masyarakat Melayu modern di Riau.

Ketika upaya pada level peraturan dan publikasi tengah diupayakan, terjadilah pergeseran pandangan terhadap selembayung akibat upaya pemerintah itu sendiri ketika memutuskan untuk menjadikannya bagian dari yang lebih universal, yakni pergeseran dari efek sakral menjadi profan. Dari perspektif yang lebih positif, pergeseran itu merupakan efek yang dapat dihindarkan dari upaya-upaya untuk menjadikan selembayung budaya massal masyarakat Melayu Riau. Dalam uraian ahli budaya selembayung diposisikan sebagai simbol-simbol dengan fungsinya yang sakral, seperti mendatangkan tuah dan memanggil dewa serta sebagai penjaga moral pemilikinya. Akan tetapi, kini penggunaan selembayung telah melambangkan kepercayaan dan kewajiban-kewajiban demikian kepada penghuni atau pengguna bangunan. Jadi, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal bangunan Melayu ini tidak kemudian mampu menyayukan masyarakatnya, jika melayu yang dimaksud adalah seperti yang diambangkan secara filosofis dalam bangunannya itu.

Walaupun, secara formal, pemerintah selalu mengiangkan tujuan-tujuan dan makna-makna yang sangat sakral berkaitan dengan kemelayuan, tetapi

dalam tindakan dan perlakuannya, kesakralan itu tidak tercermin sama sekali. Misalnya saja ketika peneliti berbincang dengan Pak Udin, petugas Penjaga dan pemelihara Istana Kesultanan Siak. Ia masih memiliki pandangan sakral dan penuh nilai ketika menguraikan posisi istana Siak dalam budaya Melayu kesekeluruhan. Perhatikan kutipan di bawah ini.

“Dengan masih adanya istana ini dan semua koleksinya, kita semua berharap melayu semakin terangkat marwahnya dan terus lestari serta terjaga selalu hingga ke tangan ke generasi selanjutnya yang tak terhingga, amin. Karena melalui semua koleksi, arsitektur bangunan istana maupun arsip yang ada, diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengenal, mengetahui nilai-nilai budaya Melayu serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.”

Tanggung jawab dan nilai yang dikandung bangunan Melayu jika menilik pemaparan Pak Udin di atas sangatlah besar. Akan tetapi, apakah nilai-nilai itu masih dirasakan oleh masyarakat? Apakah nilai dan bangunan itu memiliki kekuatan untuk membimbing dan menggerakkan masyarakat? Jawabannya adalah tidak.

Namun ia mengakui, bahwa warisan budaya di Kampar telah banyak punah dan tidak terselamatkan. Ninik mamak sebagai penjaga warisan leluhur telah memilih sejumlah rupiah hingga menggadaikan rumah lontik, rumah tradisional Kampar. Padahal peran ninik mamak disini adalah sebagai benteng untuk pelestarian budaya Kampar, terutama sejak diberikan hak lahan atas usaha pelestarian tersebut dari pemerintah daerah. Tak hanya rumah lontik, benda-benda pusaka yang selayaknya dijaga dan dipelihara, juga tergadai oleh iming-iming kolektor benda antik. Sehingga saat ini banyak benda-benda tradisional bersejarah daerah Kampar. Bukan hanya rumah lontik, situs-situs lainnya seperti makam pendiri Kampar pun tergadai, benda-benda rusak dan nyaris hancur. Untuk rumah lontik saja, tercatat ada sekitar 42 rumah tersisa. Rumah lontik ini masih dapat dijumpai di Desa Kiri. Ini merupakan kondisi yang sungguh memprihatinkan bagi

Namun demikian, seperti sudah diungkapkan di atas, pergeseran itu adalah *side effect* yang tidak bisa dihindarkan, maka dalam menghadapi tuntutan modernitas dan globalisasi, pergeseran fungsi dan sifat selembayung tidaklah menjadi soal asalkan keterkaitan di antaranya dengan masyarakat





masih kokoh. Hal ini dikarenakan ke depan, bangunan Melayu bukan saja diperuntukkan bagi orang Melayu, tetapi orang dunia. Bangunan itu tidak boleh terlalu mengikat dan spesifik berpihak kepada nilai-nilai Melayu. Tentu saja, tetap ada yang dipertahankan dari sebuah selembayung sehingga ketika dunia melihatnya maka dunia bisa berkata itu mewakili masyarakat Melayu. Hal yang perlu dipertahankan adalah fungsi simbol dari selembayung itu sendiri. Melihat selembayung adalah melihat Melayu, setiap orang bisa melihat dan merasakannya tanpa ada kewajiban atau beban moral apapun. Dengan sifat akomodatif selembayung terhadap budaya modern maka kemungkinan Melayu untuk mengglobal semakin besar. Melayu menjadi bagian dunia dan berpartisipasi dalam membentuk kebudayaan dunia. Sementara itu, Riau akan diakui sebagai wakil dari kebudayaan Melayu tersebut.

Lembaga seperti DKR, melalui ketuanya bahkan menganggap pembakuan unsur budaya Melayu dalam bidang arsitektural berupa *selembayung* tidak efektif karena dianggap mereduksi keragaman dan dalam bentuk yang lebih jauh, dapat menghambat pelestarian corak arsitektural bangunan-bangunan yang lain. Strategi ini kemudian dianggap tidak sempurna karena ditentang beberapa pihak akibat adanya lubang kekurangan dan *de effect* pada jalan yang dibangunnya ini. Oleh karena itu, upaya untuk etnikkan dan mengokohkan selembayung sebagai hasil budaya dan identitas masyarakat harus dilakukan menyeluruh dan terstruktur seperti sudah dilakukan di awal. Pemetaan bentuk dan corak secara umum, pengaturan bangunan berdasarkan makna, menegosiasikan posisinya di antara masyarakat yang bersisihan, mempublikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dunia merupakan langkah yang perlu satu persatu dilakukan.

2.6 Busana dan Identitas Masyarakat Melayu Riau

Simbol budaya yang telah disepakati oleh masyarakat Riau sebagai identitas selain dari segi arsitektur adalah busana Melayu. Berdasarkan hasil penelitian didapat (sarasehan) Pakaian Melayu Daerah Riau tahun 1990, pakaian ini dianggap menjadi salah satu puncak kebudayaan Melayu di Riau. Dalam pertemuan ini juga dirumuskan pengertian budana Melayu Riau, yaitu pakaian yang merupakan tata cara busana oleh suatu bangsa atau suku

banjarsa, individu atau kelas masyarakat yang secara historis berawal dari kurun waktu tertentu (Suwardi, 2008: 85). Pengertian busana Melayu ini tidak dibatasi dengan jelas sejak kapan, tetapi kemungkinan besar berawal dari masa kerajaan atau kesultanan yang tersebar di daerah Riau pada masa lalu.

a. Sejarah Busana Melayu

Titik dari LAMR dalam bukunya yang berjudul *Pakaian Tradisional Melayu* (2005) membagi pakaian Melayu secara lebih rinci, yakni pakaian tradisional Melayu Riau; pakaian resmi; pakaian Melayu pada upacara adat; pakaian upacara perkawinan; dan pakaian upacara keagamaan. Sementara itu, Suwardi (2008: 85) membagi pakaian Melayu ini menjadi tiga jenis, (1) pakaian harian resmi; (2) pakaian adat; dan (3) pakaian pengantin.

Pakaian resmi bagi kaum laki-laki adalah baju kurung Cekak Musang yang dilengkapi dengan kopiah, kain samping yang terbuat dari kain tenunan Siak, Indragiri, Daik, Terengganu atau kain tenun dari daerah Melayu lainnya. Pakaian resmi ini dipakai dalam pertemuan resmi pada kerajaan zaman dahulu, sedangkan pada masa kini digunakan dalam acara pemerintahan. Misalnya, dalam acara memperingati hari jadi Propinsi Riau yang pada lembarannya selalu ditulis berbusana Melayu. Sementara pakaian resmi untuk perempuan adalah baju Melayu Kebaya Laboh dan baju kurung Teluk Belanga atau baju Kurung Cekak Musang.

Pakaian Melayu Adat dipakai ketika menghadiri upacara Adat meliputi upacara penobatan raja; upacara pelantikan menteri, orang besar Kerajaan, dan pejabat adat; upacara adat adat; upacara menjunjung duli; upacara penyambutan tamu-tamu yang dihormati; upacara adat ketika menerima tamu dan menerima persembahan dari rakyat dan dari negeri-negeri lain (Damil, 2005:51).

Upacara ini dilaksanakan oleh kerajaan (Pemerintah) sebagai puncak upacara negeri ini. Seperti daerah Riau mempunyai tata cara dalam upacara adatnya sendiri, misalnya pada upacara adat tradisional Daerah Riau dan adat berpakaian telah diatur menurut tingkat dan derajat seseorang dalam masyarakat, demikian juga dalam hal warna dari pakaian tersebut.

Pakaian adat kaum perempuan pada dasarnya sama dengan pakaian harian, yaitu Baju Kurung Tulang Belut, Baju Kebaya Laboh (baju belah),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



dan Baju Kebaya Laboh Cekak Musang. Perbedaannya terletak pada bahan kain dan tata perhiasannya yang dipakai untuk suatu upacara adat. Pakaian adat laki-laki adalah baju kurung Cekak Musang berwarna hitam dari bahan saten. Tidak ada perbedaan antara orang tua, orang muda, ataupun setengah baya. Perbedaannya hanya ada pada letak kain dan tingginya ikat kain dari ukuran lutut.

Penggunaan pakaian adat ini juga dibedakan berdasarkan status, umur, dan kedudukan sosial. Para orang besar kerajaan, datuk-datuk, kaum bangsawan, penghulu balai, penghulu istana memakai kain samping berwarna, tidak boleh hitam atau kuning. Perlengkapan lain dalam berpakaian adat bagi kaum laki-laki adalah tuotp kepala yang dikenal dengan sebutan *Tanjak*. Pemakaian *Tanjak* tergantung kepada tingkat seseorang dalam masyarakat. Jenis *tanjak* ini antara lain, *Tanjak Belah Mumbang*, *Tanjak Ikat Laksemana*, *Tanjak Elang Menyongsong Angin*, *Tanjak Balong Ayam*, *Tanjak Tebing Rantau*, dan *Tanjak Ikat Biasa*.

Bentuk pakaian pengantin laki-laki orang Melayu kepulauan, Melayu Semenanjung dan Melayu Daratan tidaklah berbeda jauh, bentuk bajunya berupa baju kurung Cekak Musang atau Baju kurung teluk Belanga. Kecuali di daerah Limo Koto Kampar baju pengantin laki-laknya berbentuk jubah, yaitu baju terusan panjang hingga menutup mata kaki.

Pada masa lalu, pakaian di Riau menjadi penanda kelas sosial masyarakat tertentu. Hal ini bisa terlihat pada warna, bentuk, dan jenis pakaian. Warna yang sangat dominan dalam masyarakat Melayu Riau adalah keemasan, hijau lumut dan merah darah burung. Warna kuning melambangkan kebesaran dan kewibawaan. Yang boleh memakai kuning adalah sultan, raja, dan permaisurinya. Warna hijau lumut melambangkan aman dan kesetiaan. Warna ini dipakai oleh kaum bangsawan. Warna merah darah burung melambangkan kepahlawanan dan keberanian. Warna hitam dipakai oleh panglima atau hulu balang raja. Warna hitam melambangkan aman, ketabahan, bertanggung jawab, dan jujur. Warna ini dipakai oleh ulama (LAMR, 2005: 115-119).

Selain berdasarkan kepentingan dan kedudukan dalam masyarakat, pakaian Melayu menandakan perbedaan umur pemakainya. Pakaian Melayu anak-anak berbeda dengan pakaian Melayu remaja dan orang tua. Aksesoris

yang melekat pada pakaian juga menentukan perbedaan-perbedaan tertentu seperti halnya pakaian. Terlepas dari adanya politik penggunaan pakaian untuk membagi-bagi masyarakat berkelas-kelas (yang kini tidak sesuai lagi dengan semangat demokrasi dan multikulturalisme), pada masa lalu pakaian betul-betul menjadi cermin identitas yang efektif dan jelas.

b. Revitalisasi Busana Melayu

Semangat masa lalu itulah yang ingin diwujudkan pemerintah dengan mengantarkan kembali posisi pakaian Melayu sebagai salah satu penanda identitas Melayu di Riau. Langkah kongkret pemerintah mengenai niat ini adalah dengan dirumuskan dan disahkannya Perda Kota Pekanbaru No 12 tahun 2001 tentang Pemakaian Busana Melayu. Perda ini kemudian diikuti oleh perda-perda di kabupaten lain di Riau. Misalnya, Pemkab Siak telah mengeluarkan Keputusan Bupati untuk mewajibkan seluruh pegawai negeri agar berpakaian melayu di hari Jumat, “*Semua PNS di Siak, setiap hari Jumat wajib berpakaian melayu. Teluk belanga atau cekak musang bagi laki-laki dan baju kurung bagi yang wanita.*” Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir, setiap instansi pemerintah dan sekolah diharuskan mengenakan pakaian melayu setiap Kamis, laki-laki teluk belanga sedangkan perempuan baju kurung.

Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan ini jangkauannya sangat terbatas. Mereka hanya dikenai pada pegawai negeri dan pelajar. Itupun hanya berlaku satu hari saja. Beberapa narasumber pegawai negeri merasa tidak menggunakan pakaian tersebut karena memang diwajibkan. Tidak ada ikatan emosional tertentu apalagi yang mengidentifikasi pakaian tersebut sebagai ciri identitas mereka.

Hal lain ketika diwajibkan, berdasarkan pengakuan Sekdawan di DPRD Pangasinan, pakaian melayu dipakai dalam hari-hari besar perayaan adat, perayaan agama, pesta pernikahan dan acara adat lainnya. Pakaian melayu, terutama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Riau akan semakin berkurang karena sebagian besar diadopsi dari budaya Barat. Dengan pakaian tersebut, masyarakat Riau tidak lagi menjadi masyarakat Melayu. Identitas mereka telah berubah. Begitu pula dengan fungsi pakaian yang sebagian sudah berubah. Pakaian yang pada masa kerajaan menjadi pakaian sehari-hari, tidak lagi digunakan sehari-hari oleh



masyarakat kini. Mungkin hanya digunakan pada momen-momen tertentu. Warna pakaian juga tidak lagi mencerminkan perbedaan posisi sosial seseorang.

Artinya, ada tantangan besar yang perlu dilewati jika hendak mengembalikan posisi pakaian sebagai identitas yang dominan bagi budaya Melayu di Riau. Kondisi di atas sekaligus mencerminkan belum maksimalnya komunikasi budaya yang telah dilakukan pemerintah dan elemen-elemen masyarakat yang lain mengenai busana sampai saat ini. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan ulang dan perumusan strategi-strategi berkaitan dengan pakaian Melayu ini.

Strategi Komunikasi Budaya Busana Melayu

Sudah diungkapkan di atas tadi, pakaian merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia. Fungsi awal pakaian tentu saja untuk melindungi tubuh. Fungsi ini kemudian berkembang lebih, menjadi semacam tanda identitas seseorang. Seringkali pakaian juga erat kaitannya dengan relasi kekuasaan. Pakaian yang berbeda akan menunjukkan adanya kekuatan kuasa di lingkungan. Namun, semangat kemerdekaan dan revolusi kemudian mensyaratkan adanya kesamaan dan egaliterian yang berpengaruh juga terhadap gaya berpakaian. Setiap orang boleh mengenakan pakaian apa saja, terutama seperti Barat.

Pada masa Orde Baru, beberapa pakaian yang identik dengan ekstrem dilarang (seperti jilbab) dan ketika era reformasi menggantikannya, beberapa pakaian kembali dibebaskan. Sebagai respons terhadap reformasi, Riau pun mengembalikan lagi simbol-simbol kemelayuan yang sempat ditekan pada masa Orde Baru. Akan tetapi, sebagai satu simbol budaya, pakaian merupakan bagian yang sekaligus cermin transformasi dan reproduksi-reproduksi kebudayaan baru seiring dengan zaman yang terus bergerak. Keinginan untuk mengembalikan penggunaan pakaian Melayu menjadi simbol seperti dulu tentu saja akan sangat sulit. Bahkan kerajaan hampir dapat dipastikan mustahil. Hal ini dikarenakan banyaknya tidak lagi memungkinkan untuk memosisikan pakaian seperti

1. Pada zaman kerajaan, pakaian digunakan untuk memedakan raja dengan rakyat, untuk membedakan tugas-tugas seseorang, membedakan siapa yang berkuasa dan tidak, sementara kini pakaian lebih digunakan untuk



perbedaan-perbedaan yang sifatnya horisontal, bukan vertikal seperti pada zaman dahulu. Misalnya pakaian yang membedakan pekerjaan seseorang dengan orang lain, pakaian yang membedakan ideologi satu orang dengan orang lain, pakaian sebagai penanda prestise (orang memakai songket karena songket itu mahal, bukan karena songket itu identik dengan Melayu) dan sebagainya. Dan yang terpenting, masyarakat Melayu di Riau kini bebas memakai pakaian apa dan dari mana saja. Mereka bisa menggunakan pakaian model barat di satu waktu dan pakaian model Melayu di waktu yang lain. Mereka bebas memilih gaya seperti apa yang mereka sukai.

Oleh karena itu, sikap pemerintah dengan menerbitkan perda tentang pakaian sebenarnya sudah tepat. Perda disahkan sebagai bukti bahwa pemerintah menyadari dan memiliki kontrol moral terhadap masyarakat untuk tetap melestarikan budaya Melayu. Walau pada kenyataannya kontrol ini tidak dirangsang dengan baik oleh masyarakat, setidaknya pemerintah telah berusah. Ada hal-hal pokok dan universal dari simbol kemelayuan, dalam hal ini pakaian, yang hendak dipertahankan. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang sama, maka pada saat berpakaian Melayu walau hanya di hari Jumat atau sekedar pada acara-acara adat tertentu, mereka dapat memberikan alasan yang tepat yakni karena mereka orang Melayu. Bukan karena kewajiban dari pemerintah atau karena kebiasaan yang tidak diketahui makna dibalik kebiasaan itu. meski minimal, masyarakat telah memiliki kesadaran. Kesadaran ini yang akan membuat simbol-simbol kemelayuan tetap bertahan walau dalam kenyataannya harus bertransformasi dan mengalami pasang surut.

Persebaran fungsi penggunaan pakaian tradisional Melayu pada masa ini atau sisi menunjukkan sifat keterbukaan dan keakomodatifan adat terhadap perkembangan zaman. Di sisi lain tentu saja, sebagian jenis pakaian tradisional Melayu perlahan akan menghilang dari masyarakatnya. Menyikapi kenyataan ini, LAMR kemudian melakukan pembakuan dan menyusun berbagai ketentuan tentang pakaian tradisional Melayu. Usaha LAMR ini salah satunya diwujudkan dengan menerbitkan buku-buku tentang busana tradisional Melayu. Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan upaya serupa dengan menerbitkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2001 tentang pemakaian busana Melayu di lingkungan pendidikan, pegawai negeri sipil, swasta/badan usaha





melik daerah. Pemakaian busana Melayu ini merupakan *bagian dari upaya mendidik generasi muda disamping berguna untuk kembali menradisikan pemakaian busana Melayu dalam rangka melestarikan nilai-nilai Budaya Daerah Riau* (pasal 4, Perda 12/2001).

Sasaran dari Perda Kota Pekanbaru di atas adalah warga pendidikan dari mulai Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan, dan Perguruan Tinggi. Sasaran yang lain adalah Pegawai Negeri Sipil dan swasta atau BUMD di Kota Pekanbaru.

Adapun jenis busana yang ditentukan untuk dipakai bagi laki-laki adalah baju kurung Cekak Musang dan memakai kopiah serta kain sampung. Sementara itu, untuk perempuan adalah baju kurung labuh dan tutup kepala. Prinsipnya, busana Melayu yang digunakan berjenis baju kurung yang tidak ketat, tidak jarang (transparan) dan menutup aurat. Warna busananya ditetapkan oleh masing-masing Dinas/Instansi, jawatan, atau sekolah (Bab pasal 7, Perda 12/2001). Bagi yang tidak mengenakan sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi-sanksi tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Bagi PNS sanksi diatur dalam PP No.30 Tahun 1980.

Pemerintah propinsi juga menggunakan Busana Melayu dalam setiap acaranya. Misalnya, dalam upacara peringatan HUT Riau yang ke-40 di dragiri Hilir. Salah satu harian Riau menulis bahwa *upacara yang kali ini pun berbeda dari biasanya, karena semua pesertanya mengenakan busana Melayu* (Riau Pos, 11 Agustus 2009). Gubernur Riau (Zulhasbi Zainal) dan jajarannya juga mengenakan busana Melayu pada pembukaan Riau Expo di Pekanbaru tanggal 9 Agustus 2009 dan saat peringatan HUT Riau di kantor gubernur (Riau Pos, 11 Agustus 2009).

Walikota Pekanbaru, Ny.Evi Meiroza Herman juga mengambil langkah dalam usaha mengembangkan busana Melayu dengan menggagas even Songket Melayu pada tahun 2008. Dalam acara itu dirancang busana Melayu dengan corak dan warna lebih dari 60 jenis. Acara ini juga mencatat rekor muri atas karya kreatif songket terpanjang di dunia. Menurut Walikota Pekanbaru, songket selain digemari warga Riau juga oleh warga mancanegara. Hal ini demi melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, songket ini juga bisa menjadi komoditas ekonomi propinsi Riau. Acara ini juga dimeriahkan

oleh cara lain seperti *fashion show* songket khas Pekanbaru, pentas seni budaya, bahkan pameran kuliner.

Bersamaan dengan acara ini, kota Pekanbaru juga memberikan penghargaan dengan kategori pelestari kebudayaan kepada perseorangan atau institusi yang berjasa mengembangkan tenun songket Melayu. Walikota dalam kesempatan ini menganjurkan akan para perajin songket memikirkan bagaimana cara agar dapat memproduksi songket dengan cepat dan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat (*Riau Pos*, 21 Juni 2008).

Di tengah upaya yang terus berjalan, beberapa pihak justru menolak strategi pemerintah ini. Misalnya saja DKR. Menurut mereka, penggunaan busana Melayu di tempat kerja kuranglah tepat. Apalagi bagi para pekerja yang ada di lapangan. Selain mengurangi efisiensi kerja, penggunaan busana tersebut juga mengurangi wibawa dan sakralitas busana Melayu itu sendiri. Tidak bisa dibayangkan, seorang mandor konstruksi dengan busana Melayunya bergulat dengan kotoran dan benda-benda tajam dan keras. Mereka mengusulkan agar penggunaan busana Melayu disimbolkan dengan penggunaan songket saja, supaya dapat menyesuaikan dengan situasi kerja yang praktis, dinamis, dan profan. Jadi, terdapat kontradiksi antara pemerintah (Lembaga DPRD) dan lembaga seperti DKR dalam memahami fungsi dan penggunaan busana Melayu dalam kegiatan public sehari-hari, terutama bekerja.

Pemerintah menerapkan satu strategi ‘kembali ke asal’, yakni mengembalikan busana Melayu sebagai busana pokok yang dikenakan orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari, yang menjiwai setiap tingkah laku mereka seperti halnya orang Melayu di Riau tempo dulu. Meskipun strategi tersebut bertujuan dirinya ‘kembali ke asal’ tetapi justru syarat utamanya adalah busana Melayu harus berfungsi. Sebab, zaman sekarang bukanlah zaman yang dahulu. Zaman sekarang telah berubah dan berkembang. Busana Melayu harus digunakan dalam belajar dan bekerja. Akan tetapi, proses belajar dan bekerja zaman dahulu berbeda dengan belajar dan bekerja pada masa kini. Fungsi keberadaan busana Melayu dalam proses itupun berubah. Misalnya saja pada zaman dahulu perbedaan warna pakaian digunakan untuk membedakan perbedaan status misalnya antara raja dan rakyat. Sekarang tidak ada hubungan raja dan rakyat, yang ada gubernur dan rakyat. Jadi pasti ada pergeseran fungsi bahkan simbol di dalam penggunaan busana





Melayu. Konsep pemerintah ‘kembali ke asal’ ternyata hanya menyentuh sisi artefaksial busana Melayu, sementara sisi fungsi dan symbol-simbol yang diawanya tetap berubah. Bahkan harus berubah ketika menginginkan konsep ‘kembali ke asal’ bisa terlaksana.

Sementara itu, apa yang diusulkan DKR, merupakan suatu konsep pertahanan minimal dari suatu kebudayaan besar Melayu. Penggunaan kain songket saja sebagai simbol dimaksudkan agar kesakralan busana Melayu tetap terjaga. Selain itu, agar busana Melayu tidak menambah repot suatu pekerjaan sehingga tidak menjadi semacam penghalang keefisienan kerja. Konsep pertahanan minimal ini justru dilaksanakan guna mempertahankan fungsi-fungsi busana Melayu itu sendiri agar ia tetap sacral dan dihormati. Agar busana Melayu tidak ditempatkan sama seperti perlengkapan kerja lainnya. Konsep pertahanan minimal yang terkesan progresif dan mutakhir justru mempunyai motif yang tidak progresif sama sekali, yakni untuk mempertahankan fungsi-fungsi seperti dahulu. Busana Melayu tetap dianggap sebagai sesuatu yang merupakan peninggalan leluhur Melayu yang harus dijaga. Busana Melayu disejajarkan dengan barang-barang yang ada di rumah.

Kedua strategi yang berlawanan di atas harus didamaikan agar langkah-revitalisasi identitas Melayu di Riau dapat terlaksana. Negosiasi antara di atas harus mencapai titik konsolidasi dengan terlebih dahulu menegosiasikan hasilnya dengan perubahan zaman. Jadi, negosiasi terjadi antara masyarakat dan antara masyarakat dengan zamannya. Konsep yang mencakup kedua jenis negosiasi ini adalah konsep pertahanan minimal pergeseran fungsi. Oleh karena zaman tidak dapat diputar seperti waktu maka pertahanan fungsi-fungsi seperti dahulu tidak mungkin terjadi. Konsep pertahanan minimal dengan menggunakan songket saja sebagai simbol akan menemukan konteksnya. Hal ini hanya akan menyusahkan masyarakat dan membuat busana Melayu seperti barang yang menyusahkan. Fungsi busana Melayu itu sendiri yang akan hancur. Oleh karena itu, konsep pertahanan minimal dengan menggunakan songket saja sebagai simbol akan memudahkan masyarakat. tentu saja dengan catatan, songket tidak dimaknai sebagai alat perbedaan kelas, atau mensyarakatkan nilai-sakralan tertentu karena akan kembali menyulitkan masyarakat.

1. konsep pertahanan minimal dengan menggunakan songket saja sebagai simbol akan memudahkan masyarakat. tentu saja dengan catatan, songket tidak dimaknai sebagai alat perbedaan kelas, atau mensyarakatkan nilai-sakralan tertentu karena akan kembali menyulitkan masyarakat.

2. konsep pertahanan minimal dengan pergeseran fungsi ini merupakan konsep



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

yang sangat akomodatif, negosiatif, dan dapat menciptakan keadaan yang kondusif di antara beragam masyarakat Melayu yang ada di Riau dan antara masyarakat tersebut dengan zaman yang terus berubah.***